

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko Semester I Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara sampai akhir Bulan Juni TA 2020 adalah sebesar Rp 1.384.116.880 atau mencapai 50.96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.716.069.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020. Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 753.096.715 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 17.826.300; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 735.270.415; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 738.096.715 dan Rp 753.095.715.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 1.409.041.574 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai Rp (1.409.041.574). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 229.920 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (1.408.811.654)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 762.791.809 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (1.408.811.654) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1.384.116.560 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 738.096.715

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	320	0,00	1.905.001
JUMLAH PENDAPATAN		-	320	0,00	1.905.001
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.953.818.000	1.034.590.068	52,95	692.627.994
Belanja Barang	B.4	699.751.000	287.026.812	41,02	162.595.467
Belanja Modal	B.5	62.500.000	62.500.000	100,00	245.322.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.716.069.000	1.384.116.880	50,96	1.100.545.461

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	15.000.000	25.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	2.826.300	910.000
Jumlah Aset Lancar		17.826.300	25.910.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	65.155.040	-
Peralatan dan Mesin	C.15	934.017.190	529.145.500
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(263.901.815)	(79.712.238)
Jumlah Aset Tetap		735.270.415	449.433.262
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.23	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		753.096.715	475.343.262
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	15.000.000	25.000.000
Hibah yang Belum Disahkan	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.000.000	25.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		15.000.000	25.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	738.096.715	450.343.262
JUMLAH EKUITAS		738.096.715	450.343.262
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		753.096.715	475.343.262

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.029.227.129	692.627.994
Beban Persediaan	D.3	10.841.000	29.859.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	193.662.387	83.976.024
Beban Pemeliharaan	D.5	58.924.521	30.549.045
Beban Perjalanan Dinas	D.6	20.385.500	21.746.198
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	96.001.037	48.617.619
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.409.041.574	907.376.380
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.409.041.574)	(907.376.380)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
D.11			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.845.320	8.590.301
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.615.400	2.240.000
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		229.920	6.350.301
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		229.920	6.350.301
POS LUAR BIASA			
D.12			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.408.811.654)	(901.026.079)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	762.791.809	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.408.811.654)	(901.026.079)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.384.116.560	1.351.369.341
EKUITAS AKHIR	E.5	738.096.715	450.343.262

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

*V. CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Mukomuko

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Visi Pengadilan Agama Mukomuko adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG MANDIRI PROFESIONAL DAN KOMPETITIF”. Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi secara akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama dalam rangka peningkatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Mukomuko melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian mediasi bagi para pihak berperkara.
2. Terwujudnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama

Mukomuko.

3. Terwujudnya pelayanan prima yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya tertib administrasi perkara berdasarkan pola bindalmin sesuai dengan KMA No. 01/SK/I/1991.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas profesional aparat Pengadilan Agama.
6. Terwujudnya Aparat peradilan yang baik.
7. Terwujudnya kemudahan akses produk peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Terwujudnya penyelengga-raan administrasi umum kesekretariatan pada Pengadilan Agama Mukomuko sesuai manajemen perkantoran yang modern.
9. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk kelancaran.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Akuntansi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Mukomuko dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber

daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Mukomuko. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima

pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
 - Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp 0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Juni 2020 adalah sebesar Rp 0. Tidak terdapat pendapatan di Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Realisasi Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan Semester I TA 2020 sama dengan TA 2019 yaitu sebesar Rp.0 . Hal ini disebabkan oleh tidak ada penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji yang dialokasikan Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah dan bangunan	-	-	"
Penerimaan kembali persekot	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Realisasi
Belanja Rp
1.384.116.880*

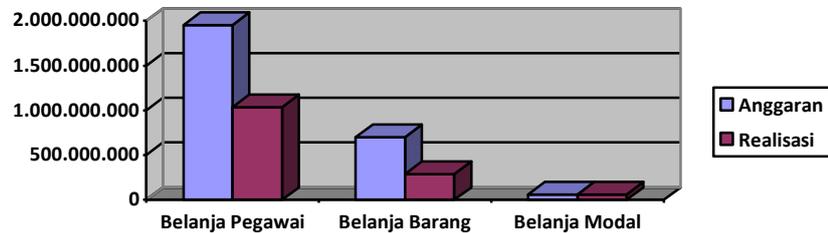
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada Juni TA 2020 adalah sebesar Rp 1.384.116.880 atau 50,96 % dari anggaran belanja sebesar Rp 2.716.069.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Juni TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.953.818.000	1.034.590.068	52,95
Belanja Barang	699.751.000	287.026.812	41,02
Belanja Modal	62.500.000	62.500.000	100,00
Total Belanja Kotor	2.716.069.000	1.384.116.880	50,96
Pengembalian		(1.028)	-
Jumlah	2.716.069.000	1.384.115.852	50,96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Belanja

Pegawai Rp

1.034.590.068

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Juni TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.034.590.068 dan Rp 692.627.994. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai pada periode Juni TA 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Juni TA 2019 sebesar 49.37%, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penambahan pegawai, adanya kenaikan jabatan pegawai staf menjadi jabatan fungsional, serta perubahan status pegawai dari Calon Hakim menjadi Hakim dan CPNS menjadi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Juni TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI JUNI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.034.590.068	692.629.022	49,37
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	1.034.590.068	692.629.022	49,37
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	1.034.590.068	692.629.022	49,37

Belanja

Barang Rp.

287.026.812

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Periode Juni TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 287.026.812 dan Rp 162.595.467. Realisasi Belanja Barang periode Juni TA 2020 mengalami kenaikan 76.53% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan pada tahun 2020 naiknya pagu belanja semua Sub Kelompok Belanja Barang sepanjang periode Juni tahun 2020.

Perbandingan Belanja Barang Periode Juni TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI JUNI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	176.775.700	68.600.000	157,69
Belanja Barang Non Operasional	0	0	#DIV/0!
Belanja Jasa	17.705.391	15.376.024	15,15
Belanja Pemeliharaan	58.864.521	28.689.045	105,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.385.500	21.746.198	(6,26)
Belanja Barang Persediaan	13.295.700	28.184.200	(52,83)
Jumlah Belanja Kotor	287.026.812	162.595.467	76,53
Pengembalian Belanja	-	0	
Jumlah Belanja	287.026.812	162.595.467	76,53

Belanja Modal

Rp 62.500.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Periode Juni TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.500.000 dan

Rp 245.322.000 . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode Juni TA 2020 mengalami penurunan (74,52)% dari Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan pada tahun 2020 adanya penurunan pagu belanja modal peralatan dan mesin sepanjang periode Juni tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode Juni TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.500.000	245.322.000	(74,52)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	62.500.000	245.322.000	-74,52

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode Juni TA 2020 adalah sebesar Rp 62.500.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.500.000	245.322.000	-74,52
Jumlah Belanja Kotor	62.500.000	245.322.000	-74,52
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	62.500.000	245.322.000	-74,52

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 15.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp 25.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2020
dan Per 30 Juni 2019*

Keterangan	2020	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000.000	25.000.000
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan 2019

Keterangan	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan per tanggal 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Pada Pengadilan Agama Mukomuko tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas pada TA 2020 dan TA 2019.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBP
Rp 0*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp 0

**5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2020 dan 2019

No	Nama	TA 2020	TA 2019
1	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2020 dan
2019*

No	Nama	TA 2020	TA 2019
1	Bagian Lancar TPA	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2020 dan 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni
2020 dan per tanggal 30 Juni 2019*

Jenis	TA 2020	TA 2019
Belanja Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp 0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2020 dan
2019*

Jenis	TA 2020	TA 2019
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan Rp
2.826.300*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 2.826.300 dan Rp 910.000

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2020 dan
2019*

Jenis	TA 2020	TA 2019
Persediaan	2.826.300	910.000
Jumlah	2.826.300	910.000

*Tagihan
TP/TGR Rp 0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2020 dan
2019*

No	Debitur	TA 2020	TH 2019
1	Tagihan TP/TGR	-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp 0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2020 dan 2019

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp 0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang TA 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah

Rp 65.155.040

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Mukomuko per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 65.155.040 dan Rp 0 terdapat perubahan aset tetap Tanah dari TA 2019 yang lalu. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020	65.155.040
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Revaluasi aset	-
Mutasi kurang:	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 30 Juni 2020	65.155.040

Peralatan dan

Mesin

Rp 934.017.190

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp. 934.017.190 dan 529.145.500. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	871.517.190
Mutasi tambah:	
Pembelian	62.500.000
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2020	934.017.190
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	-263.901.815
Nilai Buku per 30 Juni 2020	670.115.375

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pengadaan alat pengolah data PC sebanyak 5 Unit senilai Rp. 62.500.000;

*Gedung dan
Bangunan
Rp 0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 0 dan 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	-
Revaluasi aset	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp
0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

Tidak terdapat penambahan nilai pada Jalan, irigasi dan jaringan per tanggal 30 Juni 2020.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 0 dan Rp 0. Tidak terdapat mutasi tambah atas aset tetap lainnya ini untuk Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2019	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku per 30 Juni 2020	0

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Akumulasi
Penyusutan*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni

Aset Tetap Rp (263.901.815) 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing Rp (263.901.815) dan Rp (79.712.238). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2020*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	934.017.190	-263.901.815	934.017.190
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		934.017.190	-263.901.815	934.017.190

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Aset Lain-Lain Rp 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 dan adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang

Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(0)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp (0) dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0	0	0
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.15.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 25.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

No	Uraian	Tahun 2020
1	Pengadilan Agama Mukomuko	15.000.000
Jumlah		15.000.000

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 6.181.643*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp. 6.181.643 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak
Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban gaji pokok PNS	0	Beban gaji pokok yang belum dibayar per....
Beban uang makan PNS	0	Beban uang makan PNS yang belum dibayar per ..
Beban langganan internet	0	Beban langganan speedy yang belum dibayar per ..
Beban langganan listrik	0	Beban langganan listrik yang belum dibayar per ..
Beban langganan PDAM	0	Beban langganan PDAM yang belum dibayar per ..
Beban langganan telpon	0	Beban langganan telepon yang belum dibayar per ..
Total	-	

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp 0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Tidak terdapat pendapatan diterima dimuka pada Pengadilan Agama Mukomuko.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

*Ekuitas
Rp
738.096.715*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 738.096.715 dan Rp 450.343.262. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Rp 0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0	0	#DIV/0!
Penerimaan kembali Persekot/ uang muka gaji	-	0	-
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban

D.2 Beban Pegawai

Pegawai Rp

1.029.227.994

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.029.227.994 dan Rp 692.627.994. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	436.466.200	303.670.640	44
Beban pembulatan gaji PNS	7.337	4.876	50
Beban Tunjangan-tunjangan	592.753.592	388.952.478	52

*Beban
Persediaan Rp
10.841.000*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 10.841.000 dan Rp 29.859.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	10.841.000	29.859.500	-64
Jumlah	10.841.000	29.859.500	-64

*Beban Barang
dan Jasa Rp
193.662.387*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 193.662.387 dan Rp 83.976.024. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	122.556.000	47.243.500	159,41
Beban Pengiriman surat dinas pos pusat	1.163.300	763.000	52,46
Beban honor operasional satuan kerja	15.400.000	11.720.000	31,40
Beban barang operasional lainnya	37.001.900	8.873.500	316,99
Beban bahan	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	3.061.000	1.822.500	67,96
Beban Langganan Telepon	440.187	1.053.524	(58,22)
Beban Langganan Air	0	0	#DIV/0!
Beban Sewa	14.040.000	12.500.000	12,32
Jumlah	193.662.387	83.976.024	130,62

Beban Pemeliharaan Rp 58.924.521

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.924.521 dan Rp 30.549.045. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.375.580	14.442.000	158,80
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.488.941	14.247.045	50,83
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	60.000	1.860.000	(96,77)
Jumlah	58.924.521	30.549.045	92,88

Beban Perjalanan

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah

*Dinas Rp
20.385.500*

masing-masing sebesar Rp. 20.385.500 dan Rp 21.746.198. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Pada TA 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya larangan perjalanan dinas dari bulan maret hingga juni akibat pencegahan dari penyebaran covid19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	20.385.500	21.746.198	-6,26
Jumlah	20.385.500	21.746.198	-6,26

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Bantuan
Sosial Rp 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

TA 2020	TA 2019	% NAIK (TURUN)
0	0	0,00
0	0	0

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 96.001.037*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 96.001.037 dan Rp 48.617.619. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

*TA 2020 dan
2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96.001.037	48.617.619	97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	96.001.037	48.617.619	97
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	96.001.037	48.617.619	97

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp 229.920

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja Pegawai Tahun Anggaran ya	320	1.905.001	-99,98
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	1.845.000	6.685.300	(72,40)
Beban penyesuaian Nilai persediaan	1.615.400	2.240.000	(27,88)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	229.920	6.350.301	(96,38)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Pengadilan Agama Mukomuko.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp 762.791.809

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp762.791.809 dan Rp 0.

Defisit LO

Rp

(1.408.811.654)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp (1.408.811.654) dan Rp (901.026.079). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Selisih

Revaluasi Aset

Tetap Rp 0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi Nilai

Aset Tetap Non

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar

Revaluasi Rp 0 Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per Tanggal 30 Juni 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp 0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp 1.384.116.560

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.384.116.560 dan Rp 1.351.369.341. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(320)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.384.116.680
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1.384.116.360

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp (320) sedangkan DKEL sebesar Rp 1.384.116.360.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.⁴⁹

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah

Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 0.

Ekuitas Akhir

Rp

738.096.715

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 738.096.715 dan Rp 450.343.262

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang berarti untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2020 adalah :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mukomuko
A/C 111-01-01-000657-30-7 a.n. BPG
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO 401939
digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 9.195.467

F.2.2 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat ralat SPM GUP sebanyak 0 SPM dan ralat SPM Gaji 0 SPM selama periode tanggal 30 Juni 2020. Tidak ada ralat SSBP, dan SSPB selama periode tanggal 30 Juni 2020 untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

